



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 1068 -1073

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Evaluasi Penerapan Manajemen Puskesmas Penajam Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Pada 2024

Normayanti Palittin¹, Zaenal Aripin², Taufan Nugroho³, Farida Yuliat⁴, Rukhiyat Syahidin⁵

^{1,2,3,4} Magister Manajemen, Pascasarjana, Universitas Sangga Buana YPKP, Indonesia

⁵ Magister Manajemen, Pascasarjana, Universitas Langlang Buana, Indonesia

¹ palittin.normayanti@gmail.com

Abstrak

Puskesmas berfungsi sebagai lini depan dalam menyediakan layanan kesehatan primer dengan fokus pada pencegahan, promosi, pengobatan, dan pemulihan di wilayah kerjanya. Sebagai lembaga, Puskesmas harus memiliki manajemen yang efisien dan optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 sebagai panduan dalam pengelolaan Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pengelolaan Puskesmas Penajam berdasarkan ketentuan dalam Permenkes tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Evaluasi dilakukan pada aspek perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja, serta dukungan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan Puskesmas Penajam tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permenkes, sementara penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, dan dukungan dinas Kesehatan telah sesuai. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas Penajam dan mendukung pencapaian pelayanan kesehatan yang lebih baik di tahun mendatang.

Kata kunci: Evaluasi Implementasi, Manajemen Puskesmas, Permenkes, Pedoman Manajemen Puskesmas.

1. Latar Belakang

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) memainkan peran sentral dalam sistem kesehatan Indonesia, bertanggung jawab atas layanan kesehatan primer yang mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas berfungsi sebagai ujung tombak dalam upaya mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta menyediakan layanan medis dasar yang mudah diakses oleh warga. Pada Maret 2024, Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 10.292 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayahnya (Kementerian Kesehatan, 2024). Keberadaan Puskesmas yang luas ini memperlihatkan pentingnya pengelolaan yang baik dalam memastikan penyediaan layanan yang efektif dan efisien, sesuai dengan standar yang ditetapkan (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Puskesmas berperan dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana lima tahunan dari dinas kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah penerapan manajemen yang efisien dan efektif dalam mengelola sumber daya yang ada. Untuk itu, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 sebagai panduan dalam pengelolaan Puskesmas. Pedoman ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penilaian kinerja yang harus dijalankan secara berkelanjutan untuk mendukung pencapaian pelayanan yang optimal (Permenkes, 2016).

Meski Puskesmas Penajam telah memperoleh akreditasi Paripurna pada tahun 2023 dan melakukan Penilaian Kinerja Puskesmas secara rutin, evaluasi menunjukkan bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tahun 2024 masih belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan manajemen Puskesmas, terutama dalam aspek perencanaan dan penggerakan yang belum sepenuhnya optimal. Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Penajam juga menyampaikan bahwa implementasi manajemen Puskesmas di daerah tersebut masih dirasa kurang maksimal, meskipun telah ada berbagai upaya perbaikan.

Evaluasi Penerapan Manajemen Puskesmas Penajam Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Pada 2024

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pelaksanaan manajemen Puskesmas di berbagai wilayah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti (2019) mengungkapkan bahwa penerapan manajemen Puskesmas di daerah X menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan meskipun ada kendala dalam pengelolaan sumber daya manusia dan infrastruktur yang belum memadai (Siti, 2019). Penelitian oleh Prasetyo (2021) juga menemukan bahwa meskipun ada perbaikan dalam sistem manajemen, masalah pengawasan dan penilaian kinerja masih menjadi isu utama di Puskesmas (Prasetyo, 2021). Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Nurhadi (2020), yang menilai bahwa meskipun beberapa Puskesmas telah mendapatkan akreditasi, tantangan dalam hal evaluasi kinerja dan pengendalian masih menjadi kendala yang signifikan (Nurhadi, 2020).

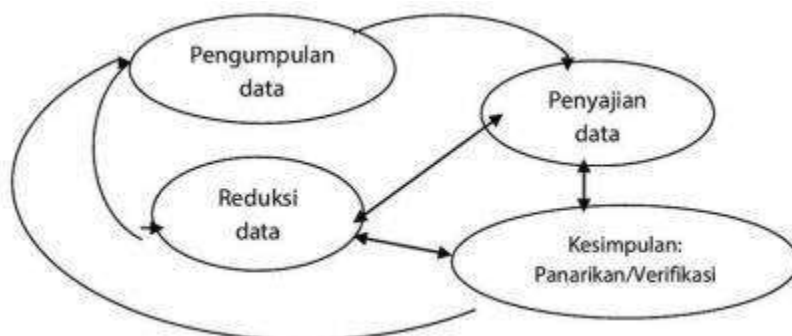
Dari tinjauan penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa banyak penelitian yang membahas tantangan dalam penerapan manajemen Puskesmas secara umum. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan manajemen Puskesmas di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengacu pada Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 yang lebih baru. Penelitian yang ada cenderung lebih fokus pada aspek umum dari manajemen Puskesmas tanpa mendalami detail implementasi berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengisi gap tersebut dengan mengevaluasi implementasi manajemen Puskesmas Penajam secara lebih mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan manajemen Puskesmas Penajam berdasarkan Permenkes Nomor 44 Tahun 2016, dengan fokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, serta pengawasan dan penilaian kinerja. Penelitian ini juga akan menilai sejauh mana dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap manajemen Puskesmas Penajam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan manajemen Puskesmas dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluatif untuk menilai efektivitas program yang dilaksanakan di Puskesmas Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian evaluatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana program yang dijalankan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan serta menilai pencapaiannya. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang sistematis untuk mengevaluasi efektivitas program serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Penelitian dilakukan di Puskesmas Penajam karena memiliki cakupan wilayah kerja terluas di Kabupaten Penajam Paser Utara dan telah meraih Akreditasi Paripurna pada tahun 2023. Meskipun demikian, beberapa target program belum tercapai, sehingga perlu dilakukan evaluasi mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan key informan, yaitu Kepala UPT, Kasubbag Tata Usaha, dan Penanggung Jawab UKM/UKP, menggunakan teknik purposive sampling. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), Profil Puskesmas, dan Dokumen Perencanaan. Instrumen penelitian yang digunakan mencakup wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif dan sistematis, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model analisis Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan.



Gambar 1. Analisis Data Miles Huberman.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, triangulasi teknik dilakukan

dengan menguji data yang sama melalui berbagai metode, dan triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data yang serupa pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan manajemen Puskesmas dan efektivitas program yang dijalankan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kepala Puskesmas Penajam, yang menjabat sejak September 2023, dan Kasubbag TU, yang telah 5 tahun berperan sebagai penanggung jawab tim manajemen, berperan penting dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan. Puskesmas ini menyusun Rencana Kerja Puskesmas (RUK) pada akhir tahun yang kemudian direkap oleh tim manajemen untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Selain itu, Rencana Program Kegiatan (RPK) disusun setelah DPA (Daftar Pagu Anggaran) diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dilakukan setiap lima tahun, dengan melibatkan analisis capaian program dan hasil Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sebelumnya.

Namun, meskipun Kepala Puskesmas dan Kasubbag TU telah mengikuti Pelatihan Manajemen Puskesmas (MP), hasil pelatihan tersebut belum disosialisasikan secara menyeluruh kepada staf lainnya. Sosialisasi terbatas pada pembahasan singkat dalam pertemuan rutin (Lokmin), yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk penyebaran informasi dan peningkatan kapasitas manajerial di seluruh jajaran staf Puskesmas.

Proses pengawasan dan evaluasi dilakukan melalui pertemuan rutin Lokmin bulanan di mana capaian RPK yang telah dilaksanakan dibahas dan kendala-kendala yang dihadapi diidentifikasi. Jika ada program yang tidak terlaksana dengan baik, diskusi masalah dilakukan melalui pemanggilan langsung terhadap PJ Program yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mencari solusi secara terbuka dan lebih mendalam. Namun, hasil PKP dan evaluasi kinerja program belum selalu disajikan secara transparan kepada seluruh staf dalam forum yang terbuka, meskipun laporan hasil evaluasi disampaikan dalam Lokmin.

Kerja sama dengan lintas sektor juga berjalan dengan baik, meskipun beberapa pertemuan lintas sektor di tahun 2024 hanya dilaksanakan dua kali, padahal seharusnya empat kali. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kehadiran kepala desa atau lurah dalam pertemuan tersebut, karena kesibukan mereka. Meskipun demikian, Puskesmas Penajam terus melakukan komunikasi melalui media sosial untuk memfasilitasi diskusi dan penggalangan komitmen lintas sektor dalam mendukung berbagai program, seperti penanggulangan stunting dan DBD.

Pengawasan dari Dinas Kesehatan dilakukan secara rutin melalui monitoring dan evaluasi (monev). Dinas Kesehatan memantau capaian program dan memberikan umpan balik terhadap hasilnya, serta memberikan solusi apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan program. Monev ini penting dalam memastikan bahwa Puskesmas Penajam dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan yang telah diusulkan.

Secara keseluruhan, penerapan manajemen Puskesmas Penajam telah berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Permenkes No. 44 Tahun 2016, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam sosialisasi hasil pelatihan, pengawasan program, serta pelaksanaan pertemuan lintas sektor. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi pelatihan manajemen kepada seluruh staf Puskesmas, peningkatan transparansi dalam penyampaian hasil evaluasi kinerja, serta penguatan kerja sama lintas sektor untuk mendukung pencapaian tujuan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, pengendalian, serta dukungan dari Dinas Kesehatan menjadi fokus utama evaluasi.

a. Proses Perencanaan (P1)

Penyusunan perencanaan di Puskesmas Penajam dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan yang dilakukan oleh tim manajemen, yang terdiri dari Kasubbag TU sebagai penanggung jawab dan seluruh staf di bagian tata usaha dan keuangan. Kepala Puskesmas tidak terlibat langsung dalam proses penyusunan Renstra, meskipun ia mempercayakan sepenuhnya kepada Kasubbag TU. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dilakukan setiap akhir tahun oleh Penanggung Jawab (PJ) Program dan dikumpulkan oleh tim manajemen untuk direkap. Penyusunan Rencana Program Kegiatan (RPK) dilakukan setelah penerbitan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dari Kabupaten, biasanya antara Januari dan Februari. Proses perencanaan ini dilakukan secara berjenjang, dengan pengumpulan usulan kegiatan yang kemudian direkap untuk memastikan bahwa setiap program mendapatkan anggaran yang sesuai.

b. Proses Pelaksanaan dan Penggerakan Kegiatan (P2)

Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Penajam digerakkan melalui beberapa forum, salah satunya adalah Lokakarya Mini (Lokmin). Lokmin bulanan yang dilaksanakan setiap bulan, kecuali pada bulan Desember, merupakan forum rutin untuk membahas hal-hal yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta rencana kegiatan untuk bulan berikutnya. Selain Lokmin bulanan, Lokmin lintas sektor juga diadakan setiap triwulan, meskipun hanya dilaksanakan dua kali pada tahun 2024 karena masalah kehadiran pihak-pihak yang diundang. Apel pagi yang dilaksanakan setiap Senin juga menjadi bagian dari metode penggerakan yang diterapkan oleh Kepala Puskesmas, di mana informasi terbaru dan hasil pertemuan disampaikan kepada seluruh staf. Pembinaan dilakukan kepada pegawai yang memiliki kinerja rendah, terutama yang terkait dengan program-program dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja mereka.

c. Proses Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian Kinerja (P3)

Pengawasan dan pengendalian di Puskesmas Penajam dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, Kepala Puskesmas melakukan pengawasan langsung terhadap staf, sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang rutin melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Selain itu, instansi lain seperti Inspektorat, Ombudsman, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pengawasan secara berkala. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tahun 2024 sedang dalam proses penyusunan, dengan hasil yang nantinya akan disampaikan kepada staf melalui Lokmin bulanan. PKP yang telah direkap oleh PJ Upaya akan dikirimkan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan umpan balik yang kemudian akan digunakan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

d. Dukungan Dinas Kesehatan terhadap Manajemen Puskesmas

Dinas Kesehatan memberikan dukungan yang signifikan terhadap manajemen Puskesmas Penajam, baik dalam hal pengembangan kapasitas sumber daya manusia maupun dalam hal pemenuhan kebutuhan anggaran dan fasilitas. Dinas Kesehatan menyelenggarakan pelatihan manajemen Puskesmas yang dapat diikuti oleh Kepala Puskesmas dan Kasubbag TU. Selain itu, Dinas Kesehatan juga sering mengadakan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas SDM di Puskesmas. Dinas Kesehatan juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan umpan balik terhadap laporan PKP yang diajukan oleh Puskesmas. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa Puskesmas dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan jadwal dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

3.2. Pembahasan

Dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, Puskesmas berperan sebagai garda depan dalam memberikan layanan kesehatan dasar. Menurut Permenkes Nomor 44 Tahun 2016, proses perencanaan di Puskesmas memiliki tahapan yang sistematis, dimulai dari perencanaan lima tahunan hingga tahunan, yang harus diselaraskan dengan tahapan pembangunan daerah. Proses ini berfungsi untuk memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan dan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dalam menghadapi tantangan kesehatan di masyarakat. Pada tahap perencanaan ini, fakta-fakta yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis dan dihubungkan untuk menyusun langkah-langkah yang diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal (Riyadi, 2005; Rohman, 2017).

Perencanaan di Puskesmas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan pertimbangan mendalam terhadap data dan kebijakan kesehatan yang berlaku pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Puskesmas harus mampu menyusun Rencana Lima Tahunan (Renstra) yang menyoroti keberlanjutan kegiatan selama satu periode. Renstra ini dibentuk oleh tim manajemen yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Tim Pembina Wilayah, Tim Pembina Keluarga, dan Tim Akreditasi Puskesmas. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa beberapa Puskesmas, seperti Puskesmas Penajam, belum sepenuhnya melibatkan Kepala Puskesmas dalam proses penyusunan Renstra atau melakukan sosialisasi yang efektif kepada tim manajemen. Penyusunan Renstra lebih banyak menjadi tanggung jawab Kasubbag TU sebagai penanggung jawab tim manajemen, yang bertugas memimpin analisis situasi dan penetapan prioritas masalah (Permenkes Nomor 44 Tahun 2016).

Penyusunan Rencana Tahunan Puskesmas (RUK) yang disusun berdasarkan evaluasi tahunan bertujuan untuk merespons permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas tersebut. RUK berisi rincian kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional, sarana prasarana, dan kegiatan rutin. Namun, proses penyusunan RUK Puskesmas Penajam menunjukkan adanya ketidakteraturan, karena RUK disusun sebelum dilakukan analisis capaian program tahun sebelumnya, yang bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam

Permenkes. Hal ini berpotensi mengurangi akurasi dan efektivitas dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk tahun mendatang.

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) juga menjadi bagian integral dari perencanaan di Puskesmas. RPK ini dirancang dengan pendekatan integrasi antar program dan sektor yang berbeda, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Puskesmas Penajam telah menerapkan penyusunan RPK yang sesuai dengan regulasi, meskipun perlu adanya evaluasi lebih lanjut terkait efektivitas penggerakan program yang dilakukan melalui lokakarya mini dan forum lintas sektor. Penggunaan teknologi informasi, seperti grup WhatsApp lintas sektor, dapat mempermudah komunikasi dan pertukaran data, yang menjadi kunci dalam penggerakan pelaksanaan kegiatan (Rusman, 2011).

Dalam proses pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja Puskesmas, diperlukan mekanisme yang jelas untuk mengukur pencapaian kinerja dan memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengawasan dilakukan baik secara internal oleh Puskesmas sendiri maupun eksternal oleh instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Puskesmas Penajam telah melaksanakan pengawasan secara berjenjang, yang mencakup pengawasan dari Kepala Puskesmas, Kasubbag TU, hingga penanggung jawab program. Selain itu, pengawasan eksternal juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang berperan penting dalam memberikan umpan balik terkait kinerja Puskesmas. Penilaian kinerja Puskesmas bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas layanan yang diberikan serta menemukan masalah yang perlu diselesaikan untuk perbaikan di masa yang akan datang (Permenkes Nomor 44 Tahun 2016).

Dukungan dari Dinas Kesehatan sangat penting dalam mengoptimalkan manajemen Puskesmas. Dinas Kesehatan kabupaten/kota memiliki peran dalam memberikan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi untuk mendukung pengelolaan Puskesmas. Puskesmas Penajam, misalnya, telah mendapatkan pelatihan manajerial pada tahun 2018 dan 2023, yang menunjukkan adanya komitmen dari Dinas Kesehatan untuk terus meningkatkan kapasitas pengelolaan Puskesmas. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan Puskesmas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat (Permenkes Nomor 44 Tahun 2016).

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji proses manajemen Puskesmas Penajam yang mencakup tiga tahapan utama: Perencanaan (P1), Penggerakan dan Pelaksanaan Kegiatan (P2), serta Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian Kinerja (P3), yang mengacu pada Permenkes Nomor 44 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar proses perencanaan di Puskesmas Penajam telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permenkes. Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki, di antaranya adalah penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang disusun sebelum dilakukan analisis capaian tahun sebelumnya, serta kurangnya sosialisasi Pedoman Manajemen Puskesmas oleh Kepala Puskesmas kepada tim manajemen. Selain itu, anggota tim penyusunan Renstra tidak sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan adanya Tim Pembina Wilayah, Tim Pembina Keluarga, Tim Akreditasi Puskesmas, dan Tim Sistem Informasi Puskesmas. Pada tahap Penggerakan dan Pelaksanaan Kegiatan, Puskesmas Penajam telah mengimplementasikan kegiatan sesuai dengan Permenkes, meskipun beberapa kegiatan, seperti Lokakarya Mini bulanan dan lintas sektor triwulanan, tidak terlaksana sesuai target. Proses Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian Kinerja Puskesmas Penajam juga telah sesuai dengan regulasi, dengan pengawasan internal dan eksternal yang berjalan dengan baik serta penilaian kinerja yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan merencanakan penyajiannya dalam lokakarya mini. Dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap manajemen Puskesmas Penajam telah berjalan sesuai dengan Permenkes, di mana Dinas Kesehatan secara rutin melakukan pengawasan, pengendalian, dan memberikan umpan balik terhadap Penilaian Kinerja Puskesmas untuk memperbaiki capaian yang ada.

Referensi

1. Kementerian Kesehatan RI. (2020). Laporan tahunan Kementerian Kesehatan 2020. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Kementerian Kesehatan RI. (2024). Dashboard Puskesmas Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3. Prasetyo, H. (2021). Analisis manajemen Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah X. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(2), 45-50.
4. Siti, R. (2019). Evaluasi manajemen Puskesmas dalam pelayanan kesehatan di wilayah Y. *Jurnal Administrasi Kesehatan*, 14(1), 12-18.
5. Nurhadi, S. (2020). Tantangan manajemen Puskesmas dalam memenuhi standar pelayanan kesehatan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Kesehatan*, 22(3), 89-96.

6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
7. Riyadi, A. (2005). Manajemen Kesehatan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia.
8. Rohman, F. (2017). Manajemen Puskesmas: Prinsip dan Praktik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
9. Rusman, M. (2011). Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
10. Dr.M.Sobry Sutikno. "Penelitian Kualitatif" .Holistica. Lombok. Listica. 2020 Wijaya, Hengki. Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
11. Sulistyawati, Dewi and Suprihanto, John and Akhmad, Jazuli. (2018) "Evaluasi Implementasi manajemen Puskesmas di UPTD Puskesmas Pejagoan Kabupaten Kebumen tahun 2016-2018 (<http://eprint.stieww.ac.id/290/>, diakses 15 Agustus 2024)
12. Latifatunnisa, Hasna. "Metode Pengumpulan Data: Jenis dan Langkah-langkah."RevoU, Oct 31 (2022). Brantas. 2009. Dasar-dasar manajemen. Bandung : Alfabeta